

Evaluasi sistem dan prosedur pengeluaran kas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Utara

Michelle Yubilia Maria Sambur

Corresponding e-mail: michellesambur2000@gmail.com

Sam Ratulangi University - Indonesia

Hendrik Manossoh

Sam Ratulangi University - Indonesia

Dhullo Afandi

Sam Ratulangi University - Indonesia

Abstract

Accounting systems and procedures of SKPD cover various processes ranging from recording, summarizing and financial reporting in the framework of APBD accountability. Cash is a current asset and in everyday monetary terms can be equated with cash on hand. The purpose of this study is to find out the systems and procedures for disbursing cash by implementing PERMENDAGRI Number 77 of 2020 at the Regional Human Resources Development Agency (BPSDMD) of North Sulawesi Province. The results of the study show that the internal control system for disbursing cash at the BPSDMD of North Sulawesi Province according to the Government Regulation Number 60 of 2008 is good, but there are still 3 points that are not appropriate, namely the control environment, control activities, information and communication. Procedures for disbursing cash at the BPSDMD of North Sulawesi Province are not fully implemented accordance to Permendagri No. 77 of 2020.

Keywords: evaluation, system, procedure, cash disbursement

Received

6 February 2024

Revised

24 February 2024

Accepted

25 February 2024

Published

25 February 2024

DOI: 10.58784/ramp.101

Copyright © 2024 Michelle Yubilia Maria Sambur, Hendrik Manossoh, Dhullo Afandi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Bendahara pengeluaran kas bertugas menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan (SPP-UP) setiap awal tahun anggaran setelah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang besaran Uang Persediaan (UP). Apabila UP telah habis digunakan, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang (SPP-GU) sebesar jumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan UP yang telah disetujui untuk jangka waktu tertentu. Akan tetapi, sering terjadi keterlambatan pencairan dana untuk mengganti uang simpanan karena Surat Permohonan Pencairan Dana tidak diterima/ditolak sehingga menyebabkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tidak dapat diterbitkan. Hal ini menyebabkan keterlambatan penyelesaian tugas/pekerjaan instansi terkait karena harus mengulang permohonan sesuai prosedur dan belum menerima dana usulan karena masih harus diperbaiki. Secara umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Utara memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis operasional Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengelolaan umum, perencanaan, pelaksanaan teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemeliharaan gedung negara dan sarana fasilitas umum, serta pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara harus memiliki sistem dan prosedur yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan dana untuk pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi atas pembayaran tunai sebagai upaya konkrit untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penerapan sebuah sistem akuntansi dalam lembaga pemerintah dapat mengoptimalkan biaya operasional yang dikeluarkan dan dapat mengaktifkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi sistem dan prosedur pengeluaran kas (khususnya UP) di BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara.

Kajian literatur

Menurut Pontoh dan Budiarso (2022), kas seringkali dilibatkan dalam sebagian besar transaksi dan tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga dapat berbentuk uang

yang ada dalam rekening bank maupun surat berharga lainnya yang dapat ditunaikan dalam waktu secara cepat. Kieso et al. (2019), dan Pontoh dan Budiarmo (2022) menjelaskan bahwa kas merupakan aset terlikuid pada susunan laporan keuangan sehingga membutuhkan pengawasan yang ketat baik dalam hal perolehan maupun penggunaannya. Pada organisasi pemerintah, bentuk pengawasan atas seluruh aset (termasuk kas) tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengimplikasikan bahwa seluruh pimpinan (menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota) wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan guna mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Mirip dengan Bodnar dan Hopwood (2013), pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Secara teknis, pengelolaan atas kas mengacu pada salah satu aturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020.

Beberapa bukti empiris menunjukkan dampak atas penerapan sistem pengendalian yang baik atas pencapaian kinerja pemerintah. Rondonuwu et al. (2020) menemukan bahwa pengeluaran kas yang sesuai aturan dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado merupakan indikator kinerja keuangan yang baik. Kasakeyan et al. (2020) menemukan bahwa penerapan sistem dan prosedur yang baik atas pengeluaran kas belanja cukup meningkatkan kinerja keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ananda et al. (2022) menemukan bahwa penerapan sistem pengendalian yang baik atas pengeluaran kas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat cukup bermanfaat dalam menunjang kinerja keuangan. Karmila dan Rahmazaniati (2022) menemukan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi yang efektif mengakibatkan pegawai lebih efisien dalam mengelola transaksi pengeluaran kas. Wibawa et al. (2023) menemukan bahwa kinerja keuangan daerah di Kabupaten Tabanan masih mengalami beberapa kendala teknis walaupun secara umum sudah baik. Stefan et al. (2023) menemukan bahwa dampak pengelolaan keuangan yang baik pada Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Manggarai Timur menyebabkan pencapaian akuntabilitas kinerja yang cukup baik dalam menjalankan pembangunan daerah. Mamangkey et al. (2023) menemukan bahwa pengendalian dan pengawasan yang baik di Desa Toiba cukup memberikan manfaat terhadap tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa. Konsisten dengan temuan Rosdiana et al. (2021) di SD Negeri Cigalar, Djou dan Kindangen (2023) juga menemukan bahwa sistem pengendalian dan pengawasan yang efektif menyebabkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Inpres Nanas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dapat dikelola dengan baik secara transparan dan akuntabel. Imbing et al. (2024) menemukan bahwa pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan berlaku di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta cukup memberikan manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat. Zeke et al. (2024) menemukan bahwa pencapaian kinerja keuangan yang baik didukung oleh sistem pengendalian internal yang baik seperti yang terjadi pada pengelolaan dana desa di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Pineleng Dua Indah. Tujuwale et al. (2024) juga membuktikan bahwa pengelolaan yang baik atas bantuan langsung tunai di Desa Sendangan dan Desa Talikuran Kecamatan Tompaso memberikan manfaat yang baik bagi pengembangan masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan proses deskripsi untuk mengungkap fakta di BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara. Fakta yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terkait pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas. Proses analisis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Mengevaluasi penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas di BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara dengan acuan Permendagri No 77 Tahun 2020. Pada tahap ini, jika ditemukan ketidaksesuaian maka ditelusuri penyebab serta diberikan rekomendasi.
2. Mengevaluasi penerapan SPIP atas pengeluaran kas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pada tahap ini, jika ditemukan ketidaksesuaian maka ditelusuri penyebab serta diberikan rekomendasi.

Hasil dan pembahasan

Sistem dan prosedur pengeluaran kas atas UP

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Permintaan pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus sebagai proses pembebanan rekening belanja. Proses permintaan pembayaran memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Hasil wawancara pada di BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara khususnya dengan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan diketahui bahwa:

"SPP dibuat dalam aplikasi FMIS. SPP terdiri dari beberapa bentuk yaitu SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang (SPP-GU), SPP Langsung (SPP-LS), dan SPP Tambah Uang (SPP-TU). Prosedur pengajuan permintaan pembayaran UP, yaitu (1) Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah; dan (2) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran UP tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah."

2. Surat Perintah Membayar (SPM)

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD. Perintah membayar didahului dengan proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan sejumlah uang dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) berdasarkan SPM yang diterima dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana dari RKUD dengan tujuan pembayaran

kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Prosedur yang sering diterapkan adalah sebagai berikut.

- a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan verifikasi.
- b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/atau KPA apabila: (1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; (2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan (3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
- c. Jika terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut maka Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- d. Jika proses verifikasi dinyatakan lengkap maka Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

Sistem pengendalian internal pengeluaran kas atas UP

1. Lingkungan pengendalian (control environment)

Lingkungan pengendalian dilaksanakan dengan menetapkan corak dan mempengaruhi kesadaran atas pengendalian sumber daya manusia. Lingkungan pengendalian pada BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal yang lain, yaitu dengan tersedianya disiplin dan struktur. Akan tetapi, khusus unsur filosofi dan gaya operasional dalam lingkungan pengendalian belum sepenuhnya diterapkan menurut Surat Kuasa yang telah ditetapkan oleh BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara.

2. Penilaian risiko (risk assessment)

Penilaian risiko yang diterapkan cenderung menitikberatkan pada penghindaran atau minimalisasi terjadinya ketidakwajaran dalam laporan keuangan. Risiko yang relevan dalam laporan keuangan mencakup peristiwa serta kondisi intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif

mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi dalam laporan keuangan. Risiko yang mungkin timbul atau berubah beserta penaksirannya yaitu perubahan dalam lingkungan operasi pada BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara, seperti sistem pencatatan baru yang yang ditetapkan sehingga dapat mengakibatkan konsumsi waktu bagi pegawai untuk melakukan penyesuaian. Sistem informasi yang baru (atau yang baru diperbaiki) sering menjadi masalah karena terkait dengan proses berlangsungnya transaksi atau pertukaran informasi data khususnya dalam hal pengeluaran kas. Teknologi baru yang ditempatkan pada BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara seperti mesin *fotocopy*, komputer, *server* jaringan memerlukan waktu pembahasan dan penanganan jika terjadi permasalahan.

3. Aktivitas pengendalian (*control activities*)

Aktivitas pengendalian di BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara berbentuk pemeriksaan internal yang dilakukan setahun sekali. Beberapa kendala umum yang sering ditemukan adalah pengendalian fisik seperti kelengkapan catatan atas kas, berkas keuangan, teknik, humas dan pelayanan yang diarsipkan di BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, pemisahan tugas dan tanggungjawab setiap pegawai yang telah diberikan wewenang masih mengalami keterbatasan.

4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)

BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara memiliki sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan. Sistem informasi yang dimaksud termasuk sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah meringkas, dan melaporkan transaksi entitats (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas atas aset, utang, dan ekuitas. Kualitas informasi dan komunikasi berdampak terhadap kemampuan dalam membuat sebuah keputusan. Akan tetapi, sistem informasi masih memiliki kendala khususnya dalam pembaruan informasi.

5. Aktivitas pemantauan (*monitoring activities*)

Aktivitas pemantauan dari BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali yang digunakan untuk menentukan kualitas kinerja pengendalian sepanjang waktu.

Evaluasi sistem dan prosedur pengeluaran kas atas UP

Prosedur	Permendagri No. 77 Tahun 2020	BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
SPP-UP	1. Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai besaran UP berdasarkan SK Kepala Daerah; 2. Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran UP kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.	1. Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai besaran UP berdasarkan SK Kepala Daerah; 2. Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran UP tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.	Sesuai
SPM-UP	1. Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, PPKSKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian UP dengan SK Kepala Daerah; 2. Jika hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; 3. PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak PA dan Surat Pernyataan verifikasi PPKSKPD.	1. Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK Kepala Daerah. 2. Jika hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. 3. PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD.	Belum sesuai dan perlu melampirkan Surat verifikasi dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKSKPD)
SP2D	1. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; 2. Jika terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM; 3. Jika proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.	1. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan verifikasi. 2. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/ atau KPA apabila: (a) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan (b) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri <i>checklist</i> kelengkapan dokumen; dan (c) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia. 3. Jika terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM. 4. Jika proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.	Belum sesuai dan perlu melampirkan Surat verifikasi dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKSKPD)

Evaluasi sistem pengendalian internal pengeluaran kas atas UP

	Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008	BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
Lingkungan pengendalian	Lingkungan pengendalian merupakan dampak kumulatif atas faktor-faktor untuk membangun, mendukung dan meningkatkan efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu. Beberapa faktor yang tercakup dalam lingkungan pengendalian yaitu: (1) komitmen terhadap kompetensi pegawai; (2) filosofi manajemen dan gaya operasi; (3) struktur organisasi; (4) cara pembagian tanggung jawab dan pemberian otoritas; dan (5) kebijakan sumber daya manusia dan prosedur personil.	1. Menetapkan corak dan mempengaruhi kesadaran atas pengendalian sumber daya manusia. 2. Menyediakan disiplin dan struktur walaupun masih terdapat keterbatasan.	Belum sesuai
Penilaian risiko	Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap toleransi risiko yang ditetapkan.	1. Melakukan penaksiran terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam sistem dan prosedur yang dijalankan serta laporan keuangan. 2. Risiko yang relevan dalam laporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi. 3. Perubahan dalam lingkungan operasi, seperti sistem pencatatan baru sehingga membutuhkan penyesuaian bagi pegawai. 4. Sistem informasi yang baru (atau yang baru diperbaiki) sering menjadi kendala pada proses transaksi pengeluaran kas. 5. Teknologi baru yang ditempatkan di BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara memerlukan waktu pembahasan dan penanganan jika terjadi masalah.	Sesuai
Aktivitas pengendalian	1. Pemisahan tugas diperlukan untuk mengurangi peluang seseorang yang ditempatkan dalam suatu posisi pekerjaan tertentu untuk melakukan kecurangan atau kesalahan ketika menjalankan tugas rutin. 2. Dokumen dan catatan memadai merupakan media fisik untuk menyimpan informasi.	1. Pemeriksaan internal dilakukan secara rutin setahun sekali. 2. Pengendalian fisik atas kas, berkas keuangan, teknik, humas, dan pengarsipan belum optimal. 3. Pemisahan tugas dan tanggungjawab pegawai masih mengalami keterbatasan.	Belum sesuai
Informasi dan komunikasi	Menjelaskan mengenai komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal. Informasi diperlukan bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal dan mendukung pencapaian tujuan. Komunikasi internal adalah sarana dimana informasi disebarkan ke seluruh organisasi, mengalir naik, turun, dan melintasi entitas. Ini memungkinkan personil untuk menanggapi pesan secara jelas dan serius dari pimpinan sebagai pengendali tanggung jawab.	1. Memiliki sistem informasi yang relevan untuk pelaporan keuangan termasuk sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, utang, dan ekuitas. 2. Sistem informasi masih belum optimal dalam pembaruan informasi.	Belum sesuai
Aktivitas pemantauan	Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu, dan memastikan apakah pelaksanaan telah sesuai tujuan dan telah disesuaikan dengan perubahan keadaan.	Pemantauan dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali untuk menentukan kualitas kinerja pengendalian sepanjang waktu.	Sesuai

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas di BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur UP belum sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 karena SPM-UP dan SP2D-UP belum sepenuhnya melampirkan Surat verifikasi dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKSKPD).
2. Komponen-komponen SPIP atas UP pada BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara telah diterapkan dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sudah baik. Akan tetapi, pengembangan dan perbaikan perlu dilakukan khususnya pada komponen lingkungan pengendalian terkait filosofi dan gaya operasional. Komponen aktivitas pengendalian intern memerlukan optimalisasi atas pengendalian fisik serta pemisahan tugas dan tanggungjawab pegawai. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas informasi dan komunikasi khususnya dalam hal pembaruan informasi.

Daftar pustaka

- Ananda, F., Winda, M., & Wijaya, R. S. (2022). Analisis pengendalian internal atas transaksi pengeluaran kas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pundi*, 6(2), 245-254. DOI: 10.31575/jp.v6i2.423
- Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2013). *Accounting Information Systems*, 11th Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Djou, E. A., & Kindangen, W. D. (2023). Implementasi sistem pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 di SD Inpres Nanas Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 1(2), 58-63. DOI: 10.58784/rapi.54
- Imbing, G. F., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2024). Analisis perbandingan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(1), 16-26. DOI: 10.58784/rapi.73

- Karmila, L., & Rahmazaniati, L. (2022). Analisis sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada Bappeda Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 5166-5172. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/7468>
- Kasakeyan, B. A., Karamoy, H., & Mawikere, L. (2020). Evaluasi sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 352-359. DOI: 10.32400/gc.15.3.28895.2020
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Intermediate Accounting*, 17th Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
- Mamangkey, D. S., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2023). Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 1(2), 95-105. DOI: 10.58784/rapi.65
- Pontoh, W., & Budiarmo, N. S. (2022). *Akuntansi Keuangan: Pencatatan dan Pelaporan Aset*. Manado: Fakultas Ilmu Budaya Unsrat Manado
- Rondonuwu, C. B., Ilat, V., & Runtu, T. (2020). Analisis sistem akuntansi pengeluaran kas pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 316-323. DOI: 10.32400/gc.15.3.28779.2020
- Rosdiana, R., Kartini, T., & Nurmilah, R. (2021). Analisis sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran dana BOS. *Competitive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 185-193. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/view/5032>
- Stefan, P. N., Tinangon, J., & Afandi, D. (2023). Analisis implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 1(2), 106-113. DOI: 10.58784/rapi.67

- Tujuwale , S. D., Warongan , J. D., & Pangerapan, S. (2024). Analisis pengelolaan bantuan langsung tunai di Desa Sendangan dan Desa Talikuran Kecamatan Tompaso. *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*, 2(1), 52-62. DOI: 10.58784/ramp.102
- Wibawa, I. G. A., Antarini, L., & Marsitadewi, K. E. (2023). Analisis kinerja keuangan daerah di Kabupaten Tabanan. *Public Inspiration Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 20-34. DOI: 10.22225/pi.8.1.2023.20-34
- Zeke, A. C., Afandi, D., & Pinatik, S. (2024). Evaluasi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa pada Desa Pineleng Satu Timur dan Pineleng Dua Indah. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 49-59. DOI: 10.58784/rapi.92